

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejak reformasi politik bergulir di Indonesia, pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi telah menjadi salah satu agenda utama dan pekerjaan rumah bagi siapapun yang berkuasa dalam pemerintahan. Antusiasme terhadap pemberantasan korupsi ini sesungguhnya disebabkan oleh munculnya anggapan bahwa kebobrokan dan kehancuran negara pada masa Pemerintahan Orde Baru tidak lain disebabkan oleh merajalelanya perilaku koruptif dalam bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di berbagai tingkat dan ranah kehidupan bernegara.<sup>1</sup>

Lembaga pemerhati korupsi global, *Transparency International* (TI), pada tahun 1999 memberi Indonesia predikat lima (5) besar negara paling ‘korup’ di dunia. Hasil survei TI ini diulang kembali pada tahun 2004 dan hasil ‘masih’ menunjukkan Indonesia sebagai peringkat kelima negara paling korup dari 146 negara yang disurvei. Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia ternyata lebih rendah daripada negara-negara tetangga, seperti Papua Nugini, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Singapura.<sup>2</sup>

Sampai dewasa ini, hasil pemberantasan tindak pidana korupsi juga masih tak kunjung membaik. Dari data yang dirilis oleh *Indonesian Corruption Watch* (ICW) pada 24 Februari 2016 selama tahun 2010 hingga

---

<sup>1</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2013, *Perilaku Koruptif Penegak Hukum Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan* (Laporan Kajian Desember 2013), Jakarta: BPHN. Hal.5.

<sup>2</sup> Evi Hartanti, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Ed.2, Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 2-3.

2014 masih terdapat sebanyak 2.492 kasus dengan total nilai kerugian negara sebesar Rp 30 triliun dan nilai suap sebesar Rp 549 miliar. Dari sejumlah kasus ini ada sekitar 552 kasus yang dikategorikan mangkrak atau tidak jelas penanganannya. Dengan kata lain, tidak ada keterangan resmi apakah kasus-kasus itu telah masuk pada tahap penuntutan atau masih dalam proses penyidikan atau bahkan dihentikan.<sup>3</sup>

Disisi lain, berdasarkan data Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah sebagaimana telah diberitakan oleh Media Tempo, kasus korupsi yang mencuat ke publik di Provinsi Jawa Tengah sendiri terbanyak ada di Semarang, yakni 20 kasus, Kabupaten Semarang (17), Karanganyar (10), Klaten dan Surakarta (9), Grobogan, Purworejo dan Kudus (8). Kerugian keuangan negara akibat kasus korupsi di Semarang mencapai Rp 71 miliar, Kagen Rp 43 miliar, Karanganyar Rp 28 miliar, Kendal Rp 25 miliar, Kabupaten Semarang Rp 22 miliar.<sup>4</sup> Dari data ini dapat diketahui bahwa wilayah yang masih bermasalah terkait dengan maraknya tindak pidana korupsi salah satunya adalah Kabupaten Karanganyar.

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara, akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian pada perekonomian rakyat. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa, “tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat

---

<sup>3</sup> <http://www.antikorupsi.org/id/content/bulletin-mingguan-anti-korupsi-25-februari-2-maret-2016> diakses pada 7 April 2016 pukul 22.30 WIB.

<sup>4</sup> <https://m.tempo.co/read/news/2012/12/30/063451111/jumlah-kasus-korupsi-di-jawa-tengah-melonjak-100-persen>, diakses pada 7 April 2016 pukul 23.00 WIB.

dibenci oleh sebagian besar masyarakat, tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia.”<sup>5</sup>

Dilihat dari segi aturan hukum, berbagai peraturan perundang-undangan, sesungguhnya telah banyak diberlakukan oleh pemerintah sejak Era Reformasi untuk memberantas tindak pidana korupsi ini dari mulai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, kemudian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sampai pembentukan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi melalui Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009. Selain KPK dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, lembaga yang masih memiliki tugas untuk penegakan hukum tindak pidana korupsi adalah Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Negeri Republik Indonesia. Terkait dengan Kejaksaan pengaturan tentang tugas dan kewenangannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Proses penyidikan dalam penanganan tindak pidana korupsi haruslah dimulai dari proses “penyelidikan” karena penyelidikan sendiri merupakan sub fungsi dari penyidikan. Ketika proses penyelidikan ini berlangsung, peran dari badan Intelijen Yustisial Kejaksaan untuk menggali informasi dalam proses penyelidikan sangat dibutuhkan. Intelijen ini merupakan salah satu

---

<sup>5</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, Hal.133

instrumen penting bagi penyelenggaraan kekuasaan negara. Intelijen juga merupakan produk yang dihasilkan dari proses pengumpulan, perangkaian, evaluasi, analisis, integrasi, dan interpretasi dari seluruh informasi yang berhasil didapatkan terkait dengan isu keamanan nasional. Dengan kata lain, intelijen merupakan sari dari pengetahuan yang mencoba membuat prediksi dengan menganalisis dan mensintesis aliran informasi terkini, serta menyediakan bagi para pembuat keputusan berbagai proyeksi latar belakang serta tindakan alternatif yang dapat dijadikan ukuran dari kebijakan dan tindakan yang akan dibuat.<sup>6</sup>

Intelijen sendiri dalam proses penegakan hukum di Indonesia terbagi menjadi dua (2), yaitu intelijen yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia dan intelijen di lingkup Kejaksaan. Selain itu ada Intelijen yang dimiliki oleh negara yang mempunyai fungsi khusus dalam pertahanan dan keamanan negara yang dapat digunakan untuk melaksanakan politik nasionalnya. Fungsi intelijen ini digunakan untuk menjaga dan mempertahankan kepentingan-kepentingan nasionalnya terhadap paksaan atau intervensi dari negara lain, serta ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang datang baik dari dalam negara maupun intervensi dari negara lain.

Agar dapat melaksanakan kegiatan penyelidikan secara maksimal, maka Intelijen Yustisial Kejaksaan melalui seksi intelijen yang bertugas melakukan mata rantai penyelidikan, yaitu sejak dari perencanaan, kegiatan pengumpulan data, kegiatan pengolahan hingga kegiatan penggunaan data.

---

<sup>6</sup> Andi Widjanjanto dan Artanti Wardhani, 2008, *Hubungan Intelijen- Negara 1945-2004*, Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung - Pacific University of Indonesia. Hal.2.

Dalam hal ini mengumpulkan dan mengelolah data serta fakta apabila timbul dugaan adanya atau telah terjadi tindak pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi. Apabila timbul dugaan telah terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana khusus maka petugas Intelijen Kejaksaan melakukan kegiatan operasi Intelijen Yustisial/penyelidikan, guna menentukan apakah peristiwa tersebut benar merupakan tindak pidana korupsi atau bukan. Dalam hal operasi penyelidikan tersebut dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan, maka setelah terkumpul cukup data dan fakta tentang telah terjadinya tindak pidana korupsi dan berdasarkan hasil telaah bidang Intelijen Kejaksaan bahwa terhadap tindak pidana tersebut telah cukup fakta atau terang guna dilakukan penyidikan.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas dan melihat peran penting dari Intelijen Yustisial Kejaksaan dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi khususnya di Kabupaten Karanganyar, maka penulis terdorong untuk menulis penulisan hukum ini dengan judul: **“KAJIAN PERAN STRATEGIS INTELIGEN YUSTISIAL KEJAKSAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kejaksaan Negeri Karanganyar).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, serta agar permasalahan yang diteliti menjadi lebih jelas dan

---

<sup>7</sup> Zainal Abidin, M. Said Karim, Slamet Sampurno Soewondo, 2013, *Implementasi Kewenangan Intelijen Yustisial Kejaksaan Dalam Melakukan Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol.2, No.3, Mei 2013. Makassar: Universitas Hassanudin. Hal. 419-43.

penulisan penelitian hukum ini mencapai tujuan yang diinginkan, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Inteligen Yustisial Kejaksaan Negeri Karanganyar dalam rangka penyelidikan dugaan kasus korupsi?
2. Apa yang menjadi hambatan Inteligen Yustisial Kejaksaan Negeri Karanganyar dalam rangka penyelidikan dugaan kasus korupsi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas agar dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian, sehingga dapat memecahkan permasalahan secara sistematis. Adapun tujuan yang hendak dicapai terdiri dari dua macam tujuan yaitu tujuan obyektif dan tujuan subyektif sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif
  - a. Mengetahui peranan Intelijen Yustisial Kejaksaan Negeri Karanganyar dalam rangka penyelidikan dugaan kasus korupsi;
  - b. Mengetahui hambatan Inteligen Yustisial Kejaksaan Negeri Karanganyar dalam rangka melakukan penyelidikan dugaan kasus korupsi.
2. Tujuan Subjektif
  - a. Menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan dan pemahaman serta kemampuan penulis di bidang Hukum Pidana khususnya yang menyangkut tentang Intelijen Kejaksaan dalam melakukan penyelidikan dugaan kasus tindak pidana korupsi.

- b. Menerapkan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh selama masa perkuliahan agar dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya serta memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.
- c. Memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 2 (dua) manfaat, yakni manfaat teoritis yang berkaitan dengan pengembangan ilmu hukum di Indonesia dan manfaat praktis yang berkaitan dengan pemecahan masalah yang diteliti. Adapun manfaat tersebut yakni:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum khususnya pada Hukum Pidana.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam kepustakaan Hukum Pidana dan dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis pada tahap selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang diteliti.
- b. Menjadi wadah bagi penulis dalam mengembangkan penalaran, membentuk pola berpikir, dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan Ilmu Hukum yang telah diperoleh.
- c. Menjadi masukan yang berguna bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dan berbagai pihak yang berminat pada permasalahan yang sama.

## E. Kerangka Pemikiran

Sebagai salah satu komponen penegak hukum, Kejaksaan RI mempunyai peran penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Dalam upaya menjaga tegaknya hukum, kejaksaan mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan dengan instansi yang lain yaitu adanya wewenang untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan. Dalam rangka menunjang dan memberikan landasan hukum dalam melaksanakan tugasnya, Pemerintah kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Di sisi lain, dewasa ini sering kita lihat pemberitaan di media massa tentang adanya kasus-kasus tindak pidana korupsi. Kegiatan korupsi ini ternyata telah merambah di segala bidang. Sebagai suatu tindak pidana yang tergolong *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa, korupsi tentu dalam pengungkapannya membutuhkan kejelian dan kecerdasan dari aparat penegak hukum, dalam permasalahan disini adalah kemampuan dari pihak kejaksaan. Hal ini karena tindak pidana korupsi sangat sulit pengungkapan dan



pembuktiannya. Jadi tidak jarang sering diketahui dan didengar terdakwa tindak pidana korupsi mendapat sanksi yang ringan atau bahkan dibebaskan karena dakwaan dari jaksa tidak terbukti atau mungkin karena unsur-unsur pidana atau alat buktinya kurang kuat.

Melihat adanya fenomena tersebut tidak lepas peran penting dari kejaksanaan karena sebagai satu-satunya lembaga yang diberi wewenang melakukan "penuntutan" sedemikian rupa Jaksa dituntut untuk dapat menjaga tegaknya hukum. Sebagai sebuah organisasi, kejaksanaan tentu tidak terlepas dari adanya sistem birokrasi. Sistem birokrasi kejaksanaan berperan penting dalam proses atau alur-alur penanganan tindak pidana korupsi dilaksanakan. Berdasarkan Keppres No. 38 Tahun 2010 Jo PERJA Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksanaan Republik Indonesia disebutkan bahwa *“untuk menunjang kinerja kejaksanaan maka dibuatlah beberapa seksi yaitu: Subbagian Pembinaan, Seksi Intelijen, Seksi Tindak Pidana Umum, Seksi Tindak Pidana Khusus, Seksi Perdata dan TUN.”*

Dalam menangani perkara tindak pidana korupsi, setiap seksi diatas tentu memerlukan kerjasama antar seksi. Akan sulit bila dalam internal kejaksanaan bekerja sendiri-sendiri sehingga patut dicermati seberapa efektif dan seberapa penting peran seksi-seksi tersebut. Untuk itu, Penulis akan mencermati dari beberapa segi antara lain:

1. Sinkronisasi horizontal, dalam hal ini kaitannnya dengan hubungan kerja antar komponen atau seksi dalam kejaksanaan.
2. Sinkronisasi vertikal, kaitannya dengan distribusi kerja dan koordinasi baik antar seksi.

Penulis di sini akan mencoba menelaah dan menganalisis lebih jauh bagaimana kinerja kejaksaan, khususnya dari sisi Seksi Intelijen Yustisial Kejaksaan dalam menangani tindak pidana korupsi. Upaya pengungkapan tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam Kejaksaan tentulah sangat berbeda dengan Kepolisian. Dalam Internal Kejaksaan, penanganan perkara korupsi ditangani oleh Seksi Tindak Pidana Khusus. Namun untuk mendapatkan keterangan awal jelas perlu kinerja dari seksi lain yaitu Seksi Intelijen Yustisial Kejaksaan. Seksi Intelijen Yustisial Kejaksaan mempunyai peran yang strategis karena tugas, pokok dan fungsi Seksi Intelijen Yustisial Kejaksaan yang berfungsi mencari dan menemukan bahan keterangan atau bukti awal adanya suatu tindak pidana korupsi. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa kesatuan pola kerja dan birokrasi dalam kejaksaan akan sangat mempengaruhi dalam pengungkapan tindak pidana korupsi. Melalui dua segi penting di atas pula nantinya akan ditemukan bagaimana pola kerja dan sistem birokrasi kejaksaan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi. Sinkronisasi vertikal dan horizontal itu nantinya mampu memberikan gambaran yang lebih terfokus dalam menemukan permasalahan, yang mana permasalahan tersebut mungkin dapat menjadi kendala tersendiri dalam internal kejaksaan. Dari cara di atas dapat ditemukan bagaimana seharusnya dan proyeksi kedepan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja kejaksaan khususnya pada bagian Seksi Intelijen Yustisial Kejaksaan di Kabupaten Karanganyar.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan tujuan, maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian, juga akan mempermudah pengembangan data yang diperoleh.<sup>8</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini hukum ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian di lapangan (*field research*), melalui penelitian lapangan ini diharapkan dapat lebih mengetahui permasalahan dan mendapatkan informasi serta data yang ada di lokasi penelitian. Penelitian ini pula tidak terlepas dari penelaahan pustaka (*library research*), terutama dalam penyusunan kerangka dasar dan landasan teori.

Dengan melakukan pengkajian dan pengolahan terhadap data penelitian dengan bertitik tolak pada fakta-fakta empiris yang ada di lapangan dan aspek hukum normatif disertai dengan kajian teoritis hukum. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat lebih mengetahui permasalahan, informasi-informasi serta data yang berada di lokasi penelitian.

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, Hal. 42.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka penyusunan teori baru.<sup>9</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu pendekatan yang menggunakan data yang dinyatakan secara verbal yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek. Penelitian seperti perilaku, tindakan, persepsi dan lain-lain secara holistik dengan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan naratif dalam konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>10</sup>

Lebih lanjut, penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara historis, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, Hal.10.

<sup>10</sup> *Ibid.*, Hal.18

<sup>11</sup> Lexy J. Moleong, 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, Hal.6.

#### **4. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ditetapkan dengan tujuan agar ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti lebih sempit dan terfokus, sehingga penelitian yang dilakukan lebih terarah. Lokasi yang digunakan oleh Penulis dalam melakukan penelitian guna penyusunan penulisan hukum ini adalah Kejaksaan Negeri Kabupaten Karanganyar

#### **5. Jenis dan Sumber Data**

Secara umum dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan bahan kepustakaan adalah data sekunder.<sup>12</sup> Jenis data yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian hukum ini adalah:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian setelah melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, laporan hasil penelitian dan sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

#### **6. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu penelitian lapangan dan penelitian pustaka:

---

<sup>12</sup>I Made Wiratha, 2006, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Andi, hal. 35.

a. Penelitian lapangan

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian lapangan dengan dua cara yaitu:

- 1) Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan metode tanya jawab secara langsung kepada responden dan narasumber di Kejaksaan Negeri Karanganyar.
- 2) Pengamatan (observasi) yang dilakukan secara intensif terhadap objek penelitian

b. Penelitian Pustaka

Penelitian pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari buku-buku, surat kabar, internet, majalah, peraturan perundang-undangan, yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti serta data dari kantor terkait.

## 7. Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif, “analisis data model interaktif”. Menurut Miles dan Huberman terdiri atas empat tahapan. Tahapan pertama adalah tahap pengumpulan data, tahap kedua adalah tahap reduksi data, tahap ketiga adalah tahap *display* data, dan tahapan keempat adalah tahap penarikan kesimpulan dan/atau tahap verifikasi.”<sup>13</sup> Dalam proses analisa data, keempat komponen ini saling berinteraksi dan saling membentuk siklus. Peneliti tetap bergerak di antara keempat komponen tersebut dengan

---

<sup>13</sup>Haris Herdiansyah, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, hal. 164.

proses pengumpulan data selama proses kegiatan pengumpulan data berlangsung, setelah pengumpulan data berakhir, peneliti bergerak diantara keempat komponen utama untuk menarik kesimpulan dengan verifikasi atau berdasarkan semua hal yang terdapat dalam pengumpulan data, reduksi data dan *display* data.

#### G. Sistematika Skripsi

Agar lebih mudah di dalam melakukan pemahaman terhadap hasil penelitian, maka penulis akan membagi penulisan hukum menjadi empat bab yang setiap babnya dibagi menjadi sub-sub bagian. Adapun sistematika penulisan hukum sebagai berikut:

**Pendahuluan**, yang terdiri dari latar belakang, Rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

**Tinjauan Pustaka**, yang berisikan mengenai tinjauan umum Intelijen Yustisial Kejaksaan, tinjauan umum tentang penyelidikan, tinjauan umum Kejaksaan, tinjauan umum tindak pidana korupsi

**Hasil Penelitian dan Pembahasan**, yang diuraikan tentang peran dari Intelijen Yustisial Kejaksaan Negeri Kabupaten Karanganyar dalam rangka penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi; hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Intelijen Yustisial Kejaksaan Negeri Kabupaten Karanganyar dalam melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi.

**Penutup**, berupa kesimpulan dari hasil penelitian dan saran sebagai bentuk tindak lanjut dari penelitian.